

INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Natasya Dwi Puspita

NPP. 30.1019

Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: natasyapuspita18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Elvira Mulya Nalien, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The independence of a region is seen from how much the area is capable of administering its government. Many regions are still dependent on the central government. This also happened with the local government of Tanah Laut Regency. Judging from the Budget Realization Report, the local government of Tanah Laut Regency still receives transfer funds from the central government where the nominal value is greater than the original regional income.

Purpose: The purpose of this study is to determine the Regional Financial Capability Index for Tanah Laut Regency for the 2017-2021 fiscal year as seen from three indicators, namely the Share, Index Growth, and Index Elasticity. In addition to knowing the inhibiting factors and efforts that have been made by the local government to overcome these obstacles. **Method:** The research approach is using a Qualitative Approach, Descriptive Method, and Inductive Thinking Framework. The data used in this study are Regional Financial Reports, namely the Regional Income and Expenditure Budget of Tanah Laut Regency as secondary data and the results of interviews with the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency and other related officials as primary data. Data collection was carried out using Semi-Structured Interview Techniques and Documentation. Data analysis uses Data Reduction Analysis Method, Data Presentation and Data Description through analysis of Financial Capability Index and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that the level of Regional Financial Capability Index for Tanah Laut Regency is high, especially for the 2017-2021 fiscal year. The results of the analysis of the Financial Capability Index show at number 0.57 which belongs range height. **Conclusion:** Although belonging to range high but there are still inhibiting factors that affect financial capacity, namely public awareness in paying taxes is still low, a shortage of experts whose role is to manage regional potential and also local governments which are still very dependent on the central government. Based on the results of the analysis, the efforts that have been made by the government are providing special applications in tax management and transforming regional potentials for the younger generation.

Keywords: Analysis, Index Financial Ability, Dependency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar kemampuan daerah tersebut mampu dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Banyak daerah yang masih bergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini juga yang terjadi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah

Laut masih mendapatkan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dimana nominalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2017-2021 yang dilihat dari tiga indikator yakni Indeks Share, Indeks Growth, dan Indeks Elastisitas. Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Pendekatan penelitian yakni menggunakan Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif, dan Kerangka Berpikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Daerah yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai data sekunder dan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta pejabat terkait lainnya sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik Wawancara Semi-Terstruktur dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan Metode Analisis Reduksi Data, Penyajian Data dan Deskripsi Data melalui analisis Indeks Kemampuan Keuangan serta penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk tinggi, khususnya tahun anggaran 2017-2021. Hasil analisis Indeks Kemampuan Keuangan menunjukkan di angka 0,57 yang tergolong range tinggi. **Kesimpulan:** Walaupun tergolong dalam range tinggi namun masih terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi kemampuan keuangan yakni kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, kekurangan tenaga ahli yang berperan untuk mengelola potensi daerah dan juga pemerintah daerah yang masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil analisis, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni menyediakan aplikasi khusus dalam pengelolaan pajak dan melakukan transformasi potensi daerah kepada generasi muda.

Kata Kunci: Analisis, Indeks Kemampuan Keuangan, Ketergantungan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas nasional adalah adanya tanggung jawab dari pemegang kekuasaan. Akuntabilitas nasional merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas hak dan kewajiban yang diembannya dalam keberhasilannya membangun negaranya. Pemegang kekuasaan yang akuntabel adalah seseorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah daerah dalam hal pemegang kekuasaan yang akuntabel dituntut untuk dapat mengelola dengan baik sumber daya daerahnya agar pertanggungjawaban atas azas otonomi daerah yang diembannya berjalan dengan baik (Mahmudi, 2007).

Pemberlakuan otonomi daerah guna pembangunan daerah yang berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri atas kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Tujuan utama dilaksanakan sistem otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kemandirian pemerintah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan dan potensi maupun karakteristik yang dimiliki daerahnya.

Berdasarkan pada undang-undang tersebut, pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah mempunyai kesempatan untuk mengelola potensi yang dimiliki daerahnya dan meningkatkan kemampuan keuangan. Dasar pertimbangan dilaksanakan otonomi daerah ini yaitu perkembangan dari dalam negeri yang menunjukkan tanda bahwa masyarakat ingin kemandirian dan keterbukaan sedangkan dari luar negeri juga menunjukkan globalisasi yang sangat cepat yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap pemerintah daerahnya masing-masing (Halim, 2012).

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab memerlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangannya sendiri. Didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Langkah yang diambil untuk memastikan pelaksanaan yang baik dari pemerintah daerah, peningkatan sumber pendapatan asli daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang dikelola atau melalui sumber pendapatan asli daerah yang perlu digali sesuai dengan peraturannya. Demi meningkatkan kemampuan keuangan dalam upaya untuk meningkatkan dan potensi lokal. Upaya menggali dan meningkatkan potensi berbagai daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan agenda pemerintahan, pembangunan dan pengabdian masyarakat di daerah (Halim, 2004).

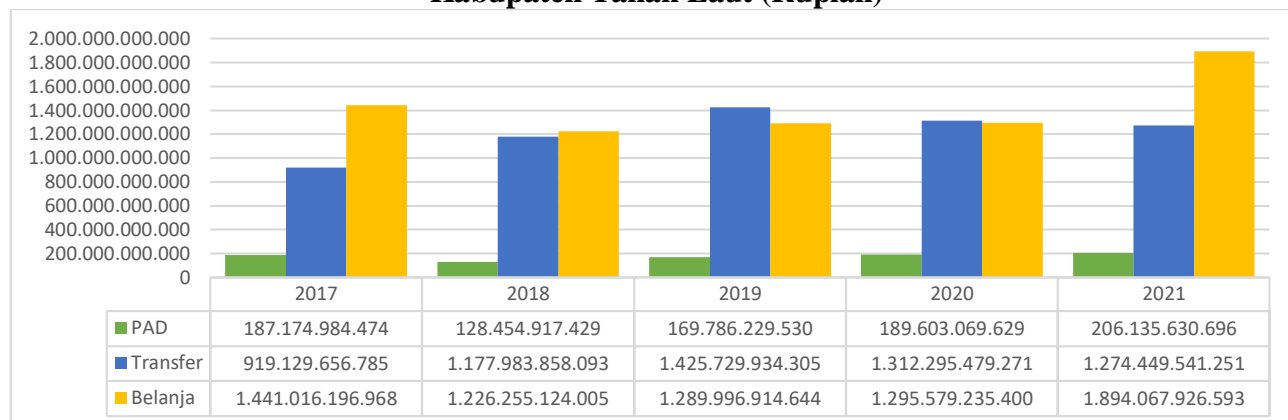
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan utama pemerintah daerah. Mencakup kemampuan pemerintah untuk melakukan kegiatan keuangan untuk pelaksanaan pembangunan, pemerataan dan definisi melalui pengembangan semua kemungkinan daerah (Nordiawan, 2007).

Kreativitas dan inisiatif lokal sangat penting untuk menemukan sumber keuangan. Hal ini tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, sumber daya keuangan yang mendukung berbagai kegiatan masyarakat dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, eksploitasi dan mobilisasi berlebihan sumber daya keuangan dapat memiliki efek jangka panjang yang negatif. Hal ini didasarkan pada aliran pendapatan dari satu daerah ke daerah lain dan masih memiliki keragaman. Ada beberapa daerah yang dinilai cukup mandiri dari segi sumber daya yang dimiliki, dan banyak juga yang mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber daya keuangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan organisasi pemerintah daerah yang dibentuk dengan fungsi dan peranan yang penting di bidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih ketergantungan dengan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Sistem desentralisasi yang dilaksanakan Kabupaten Tanah Laut harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan efektif dan efisien. Berikut merupakan gambaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilihat dari pendapatan asli daerah terhadap Belanja dan Pendapatan Transfer tahun anggaran 2017-2021:

Grafik 1.1
PAD Terhadap Pendapatan Transfer dan Belanja
Kabupaten Tanah Laut (Rupiah)



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut masih tergolong rendah dibandingkan dengan pendapatan Transferynya. Terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017 sebesar Rp187.174.984.474,43 atau sebesar 20,36% dibandingkan dengan transfer yakni sebesar Rp919.129.656.785,00. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018 menunjukkan nominal sebesar Rp128.454.917.428,69 atau sebesar 10,90% dibandingkan dengan pendapatan transfer yakni sebesar Rp1.177.983.858.093,00. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nominal sebesar Rp169.786.229.529,69 atau sebesar 11,91% dibandingkan dengan transfer yakni sebesar Rp1.425.729.934.305,00. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 menunjukkan nominal sebesar Rp189.603.069.628,77 atau sebesar 17,17% dibandingkan dengan transfer yakni sebesar Rp1.312.295.479.271,00. Pada tahun 2021 sendiri realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan nominal sebesar Rp206.135.630.695,55 atau sebesar 17,55% dibandingkan dengan transfer yakni sebesar Rp1.274.449.541.251,00. Pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut yang mengalami pergerakan secara fluktuatif atau mengalami naik-turun setiap tahunnya belum mampu untuk membiayai kebutuhan belanjanya.

Kesimpulan dari data di atas bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut hanya berkisar 10-20% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Adanya data tersebut juga terlihat bahwa pendapatan asli daerah hanya mampu sekitar 10-15% menutupi total belanja daerah Kabupaten Tanah Laut. Data tersebut membuktikan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut belum bisa menjadikan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut belum menghasilkan pendapatan asli daerahnya dengan optimal untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran masyarakat atas pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadikan salah satu faktor penyebab pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong kecil dan belum bisa untuk dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad Darmin, S.IP., M.Si dalam wawancara via *whatsapp* sebelum dilaksanakan magang bagi satuan praja utama.

Daerah dapat dinamakan daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah otonom yaitu kemampuan masing-masing daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha peningkatan sumber keuangan yang berasal dari daerahnya sendiri (Astiti & Mimba, 2016).

Ciri utama dari daerah yang mampu dalam berotonomi yaitu dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya. Daerah otonom harus memiliki wewenang dan kemampuan yang optimal dalam mengelola dan menggali sumber keuangannya sendiri, sedangkan ketergantungan dengan pemerintah pusat harus dapat diminimalisir.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah berdasarkan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya menuju masyarakat yang bebas dari korupsi dan hukuman. Keseimbangan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mendukung pemerintahan negara adalah tentang peningkatan efisiensi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengoptimalkan cakupan pelayanan dan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi aslinya untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan lokal yang dihasilkan berkontribusi pada pertumbuhan impor dan memungkinkan pemerintah daerah untuk meminimalkan ketergantungan mereka pada pendanaan pusat. Belanja modal dengan tingkat yang tinggi menggambarkan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangunnya. Pada dasarnya, apabila tingkat pembangunan infrastruktur tinggi maka akan meningkatkan pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat pada daerahnya dan akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan daerahnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengelola keuangan juga akan mengalami peningkatan (Ayu Riana Sari et al., 2020). Infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi di berbagai bidang pemerintahan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan juga mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah yang sedang ditingkatkan (Putu et al., 2018).

Berdasarkan uraian di atas mengenai keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerahnya dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Niken Marita Pratiwi (2017) dengan judul *Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta*, menunjukkan bahwa indeks kemampuan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan di angka 0,40318 dimana hal tersebut membuat kemampuan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sedang. Penelitian milik Deasy Susana R. Ndaparoka, Alfred T. Rantelobo, dan Selfesina Samadara (2018) dengan judul *Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat*, menyatakan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2011-2015 dianggap masih kurang. Kemudian, Penelitian Anggi Putra Wiguna (2018) berjudul *Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin*, menunjukkan kinerja keuangan daerah Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kapasitas fiskal lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan fiskal. Penelitian milik Eko Aristanto (2020) dengan judul *Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Daya Dukung Pelaksanaan Program Sumber Daya Air dan*

Ketahanan Pangan, menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kabupaten yang berada pada kategori sangat tinggi sebanyak 138 kabupaten. Rasio kemampuan rutin daerah menunjukkan kabupaten dengan kategori sedang sebanyak 70 kabupaten. Rasio derajat otonomi fiskal menunjukkan kabupaten dengan kategori sangat rendah sebanyak 87 kabupaten. Indeks kapasitas fiskal daerah menunjukkan sebanyak 46 kabupaten berada pada kategori sedang. Penelitian oleh Sakinah Nurul Khaerati B. (2022) dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan hasil penelitian yakni kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo masih tergolong rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dimana pada penelitian terdahulu menggunakan analisis kinerja keuangan daerah yang umumnya menggunakan analisis rasio sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode Analisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah yang terdiri oleh tiga indikator yaitu Indeks *Share*, Indeks *Growth*, dan Indeks Elastisitas.

1.5. Tujuan

Tujuan pada penelitian kali ini yakni untuk mengetahui indeks kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2017-2021 dalam melaksanakan pemerintahan daerahnya serta faktor penghambat dalam mengembangkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mengatasi faktor penghambat dalam mengembangkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Metode Deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Peneliti menyimpulkan bahwa Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif dan Kerangka Berpikir Induktif merupakan suatu metode penelitian yang menyajikan atau menggambarkan fakta-fakta empiris secara sistematis mengenai suatu objek penelitian berupa fenomena sehari-hari dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian yakni sumber data primer yang didapatkan dengan proses wawancara secara langsung dengan informan. Para informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan maksud informasi yang disampaikan berasal dari para informan yang menguasai di bidangnya masing-masing. Kemudian, sumber data sekunder yang didapatkan diperoleh dengan dokumentasi yakni Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2017-2021. Data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data dan deskripsi data melalui analisis indeks kemampuan keuangan serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Usaha untuk mengukur kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dilihat dari Laporan realisasi anggaran Kabupaten tanah Laut maka peneliti fokus terhadap data yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan analisa

terhadap wawancara yang dilakukan pada beberapa pegawai yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut turut didukung oleh pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dengan analisis indeks kemampuan keuangan yang memiliki tiga indikator yaitu Indeks *Share*, Indeks *Growth*, dan Indeks Elastisitas.

3.1.1. *Share*

Share merupakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah. *Share* dapat dihitung dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah yang terealisasi dengan total belanja daerah. Indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$s (\%) = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100$$

Melihat rumus di atas, maka *Share* menggambarkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah dalam usaha pemenuhan belanja seluruh kegiatan pemerintahan. Berikut merupakan Tabel *Share* Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 4.1
Nilai *Share* Kabupaten Tanah Laut

Tahun	PAD (Rp)	Total Belanja (Rp)	Share (%)
2017	187.174.984.474,43	1.441.016.196.968,30	12,99
2018	128.454.917.428,69	1.226.255.124.004,60	10,48
2019	169.786.229.529,69	1.289.996.914.643,93	13,16
2020	189.603.069.628,77	1.295.579.235.400,00	14,63
2021	206.135.630.695,55	1.664.349.002.932,83	12,39

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *Share* Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 sebesar 12,99% dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 10,48%. Setelah mengalami penurunan di tahun 2018, *Share* terus mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 14,63% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 *Share* mengalami penurunan sebanyak 2,24% menjadi 12,39%.

3.1.2. *Growth*

Growth merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. *Growth* ini dapat dihitung menggunakan rumus yakni:

$$g (\%) = \frac{(PAD_i - PAD_{i-t})}{PAD_{i-t}} \times 100$$

Melihat rumus di atas maka *Growth* menghitung selisih pertumbuhan PAD terhadap tahun sebelumnya. Berikut merupakan tabel *Growth* Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 4.2
Nilai *Growth* Kabupaten Tanah Laut

No	Tahun	PAD (Rp)	Growth (%)
1.	2017	187.174.984.474,43	-
2.	2018	128.454.917.428,69	-31,37
3.	2019	169.786.229.529,69	32,18
4.	2020	189.603.069.628,77	11,67
5.	2021	206.135.630.695,55	8,72

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa *Growth* Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018, *Growth* menyentuh angka negatif yaitu sebesar -31,37%. Namun, pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan menembus angka positif yaitu sebesar 32,18%. Pada tahun-tahun berikutnya, Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong melambat hingga pada tahun 2021 menyentuh angka 8,72% saja.

3.1.3. Elastisitas

Elastisitas adalah rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan pendapatan daerah regional bruto. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas pendapatan asli daerah terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Elastisitas ini dapat dihitung menggunakan rumus yakni:

$$e (\%) = \frac{PAD_i - PAD_{i-t}}{PDRB_i - PDRB_{i-t}} \times 100$$

Melihat rumus di atas maka Elastisitas merupakan perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas berperan mengukur selisih pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap selisih pertumbuhan pendapatan daerah regional bruto. Elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan Elastisitas berikut ini:

Tabel 4.3
Nilai Elastisitas Kabupaten Tanah Laut

No	Tahun	PAD (Rp)	PDRB (Rp)	Elastisitas (%)
1.	2017	187.174.984.474,43	12.329.410.000.000,00	-
2.	2018	128.454.917.428,69	13.241.240.000.000,00	-6,44
3.	2019	169.786.229.529,69	13.902.300.000.000,00	6,25
4.	2020	189.603.069.628,77	13.786.690.000.000,00	-17,14
5.	2021	206.135.630.695,55	14.755.190.000.000,00	1,71

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kepekaan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya terus berubah-ubah. Kepekaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya tidak bisa dikatakan terus bergerak naik ataupun turun dikarenakan setiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018, Indeks Elastisitas Kabupaten Tanah Laut bernilai negatif sebesar -6,44%. Sedangkan, pada tahun 2019 meningkat tajam menjadi bernilai positif sebesar 6,25%. Kemudian, di tahun berikutnya yakni di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan bernilai negatif menjadi -17,14%. Sedangkan, pada tahun 2021 mengalami kenaikan bernilai positif menjadi 1,71%.

3.1.4. Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari *Indeks Share*, *Indeks Growth*, dan *Indeks Elastisitas*. Penyusunan tiga komponen indeks tersebut harus ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Perhitungan nilai indeks dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

$$Indeks X = \frac{(Nilai \times Hasil \text{ Pengukuran}) - (Nilai \times Kondisi \text{ Minimum})}{(Nilai \times Kondisi \text{ Maksimum}) - (Nilai \times Kondisi \text{ Minimum})}$$

Berikut merupakan hasil perhitungan dari indeks x untuk menghitung indeks kemampuan keuangan:

1. Indeks *Share* (XS)

Berikut perhitungan penentuan nilai Indeks X pada indikator *Share*:

Tabel 4.4
Nilai Indeks *Share*

No.	Tahun	Nilai <i>Share</i>	Nilai Min	Nilai Max	Indeks <i>Share</i> (XS)
1.	2017	12,99	10,48	14,63	0,60
2.	2018	10,48	10,48	14,63	0,00
3.	2019	13,16	10,48	14,63	0,65
4.	2020	14,63	10,48	14,63	1,00
5.	2021	12,39	10,48	14,63	0,46
Mean					0,54

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *mean* dari Indeks *Share* adalah 0,54.

2. Indeks *Growth* (XG)

Berikut perhitungan penentuan nilai Indeks X pada indikator *Growth*:

Tabel 4.5
Nilai Indeks *Growth*

No.	Tahun	Nilai <i>Growth</i>	Nilai Min	Nilai Max	Indeks <i>Growth</i> (XG)
1.	2017	0,00	-31,37	32,18	0,49
2.	2018	-31,37	-31,37	32,18	0,00
3.	2019	32,18	-31,37	32,18	1,00
4.	2020	11,67	-31,37	32,18	0,68
5.	2021	8,72	-31,37	32,18	0,63
Mean					0,56

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *mean* dari Indeks *Growth* adalah 0,56.

3. Indeks Elastisitas (XE)

Berikut perhitungan penentuan nilai Indeks X pada indikator Elastisitas:

Tabel 4.6
Nilai Indeks Elastisitas

No.	Tahun	Nilai Elastisitas	Nilai Min	Nilai Max	Indeks Elastisitas (XE)
1.	2017	0,00	-17,14	6,25	0,73
2.	2018	-6,44	-17,14	6,25	0,46
3.	2019	6,25	-17,14	6,25	1,00
4.	2020	-17,14	-17,14	6,25	0,00
5.	2021	1,71	-17,14	6,25	0,81
Mean					0,60

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *mean* dari Indeks Elastisitas adalah 0,60. Maka dari tabel perhitungan di atas dalam menentukan nilai Indeks X dalam tiap-tiap indikator maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Nilai Indeks X Guna Penentuan Mean

No.	Tahun	Indeks <i>Share</i> (XS)	Indeks <i>Growth</i> (XG)	Indeks <i>Elastisitas</i> (XE)
1.	2017	0,60	0,49	0,73
2.	2018	0,00	0,00	0,46
3.	2019	0,65	1,00	1,00
4.	2020	1,00	0,68	0,00
5.	2021	0,46	0,63	0,81
IKK		0,54	0,56	0,60

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berikut merupakan rumus untuk mengukur Indeks kemampuan keuangan (Koespramoedyo, 2003):

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Nilai perhitungan indeks kemampuan keuangan menghasilkan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dibagi menjadi tiga kriteria, (Koespramoedyo, 2003) yaitu: rendah dengan kriteria *range* 0,00-0,33; sedang dengan kriteria *range* 0,34-0,43; dan tinggi dengan kriteria *range* 0,44-1,00. Berikut merupakan hasil bentuk perhitungan dari indeks kemampuan keuangan:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

$$IKK = \frac{0,56 + 0,60 + 0,54}{3}$$

$$IKK = 0,57$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam kriteria tinggi dengan *range* 0,44 – 1,00 yakni 0,57. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Mengembangkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat, menghalangi, atau mencegah tercapainya suatu tujuan. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam mengembangkan kemampuan keuangan daerahnya terdapat beberapa faktor penghambat yakni: pertama, rendahnya kesadaran masyarakat daerah Kabupaten Tanah Laut dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam membayar pajak tersebut disebabkan akses jarak dari tiap-tiap kecamatan menuju kota kabupaten tergolong jauh. Kedua, pengelolaan potensi daerah yang tergolong masih belum maksimal. Ketidak-maksimalan dalam mengelola potensi daerah terlihat banyaknya masyarakat yang mengelola potensi daerah dengan latar pendidikan yang rendah atau tidak sesuai. Masalah yang ketiga yakni ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Jika dilihat pada laporan realisasi anggaran terlihat bahwa pendapatan daerah sebagian besar berasal dari pendapatn transfer, sedangkan pendapatan yang berasal dari asli daerah hanya berkisar 10-15% dari total keseluruhan.

3.3. Upaya yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ini betujuan untuk meminimalisir dari adanya faktor penghambat yang bertujuan guna mempermudah dalam meningkatkan kemampuan keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan penjelasan singkat diatas terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu: pertama, menyediakan aplikasi khusus dalam pengelolaan pajak. Adanya aplikasi khusus dalam pembayaran pajak ini memiliki tujuan untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat ditingkatkan. Tujuan lainnya juga sebagai bentuk kemudahan masyarakat untuk membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Kedua, pengadaan program YESS bagi generasi muda. Program YESS merupakan program pelatihan bagi generasi muda untuk dapat mengelola hasil potensi daerah sehingga menghasilkan masyarakat muda yang memiliki keahlian khusus dalam mengelola potensi daerahnya. Program YESS ini juga memberikan fasilitas penunjang untuk masyarakat muda untuk mengelola potensi daerahnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian terkait Analisis Indeks Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan mengamati proses pengelolaan keuangan melalui laporan realisasi anggaran Kabupaten Tanah Laut. Penelitian Niken Marita Pratiwi tahun 2017 meneliti tentang Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tahun 2018 milik Deasy Susana R. Ndaparoka, Alfred T. Rantelobo dan Selfesina Samadara meneliti tentang Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Penelitian Anggi Putra Wiguna tahun 2018 meneliti tentang Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin. Kemudian, penelitian milik Eko Aristanto tahun 2020 ini meneliti Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Daya Dukung Pelaksanaan Program Sumber Daya Air dan Ketahanan Pangan. Terakhir, ada penelitian milik Sakinah Nurul Khaerati B. meneliti tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kelima penelitian tersebut membahas kemampuan keuangan daerah dalam mengelola pemerintahan daerahnya menggunakan teori kinerja keuangan daerah dengan lokus penelitian yang berbeda-beda. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan membahas kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan teori indeks kemampuan keuangan daerah serta penulis juga meneliti terkait dengan faktor penghambat dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil pembuktian teori Indeks Kemampuan Keuangan dimana hasil penelitian menunjukkan angka 0,57 yang termasuk ke dalam range 0,44-1,00 yang termasuk ke dalam range tinggi. Selain itu juga, hal tersebut terbukti dari Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2019-2020 dimana pada masa tersebut pandemi covid-19 melanda dunia yang juga berdampak pada keuangan dunia. Akan tetapi, pada tahun tersebut Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan keangka positif untuk pendapatan daerahnya dan mengalami penurunan untuk belanja daerahnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kemampuan keuangan daerah diukur berdasarkan hasil analisis indeks kemampuan keuangan (Koespramoedyo, 2003) menunjukkan bahwa Kabupaten

Tanah Laut dengan nilai 0,57 yang masuk ke dalam kategori range 0,44-1,00 yaitu termasuk ke dalam kategori tinggi. Faktor penghambat dalam meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Tanah Laut yakni: Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah; Kekurangan tenaga ahli untuk mengelola potensi daerah; dan Ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut terhadap Dana Transfer. Serta, Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut yakni: Menyediaan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah; dan Pengadaan program YESS bagi generasi muda.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih dalam secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan lanjutan secara detail terkait analisis indeks kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan utamanya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Ayu Riana Sari, F. R., Wulandari, A., Pujiarti, N., Laily, N., Vina, Anhar, Y., Anggraini, L., Azmiyannoor1, M., Ridwan, A. M., & Muddin, F. I. I. (2020). Perilaku Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Karakteristik Individu dan Sikap Masyarakat. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(128), 32–37.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah* (Ed. 1). Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat. http://ucs.sulselib.net/index.php?p=show_detail&id=19566
- Koespramoedyo, D. (2003). Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. *Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. <http://fia.ub.ac.id:80/katalog/images/docs/images.jpg.jpg>
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. <http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=657.6&q2=Ded&q3=A&q4=9789796914418>
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110.